

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Myanmar merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang hingga kini pemerintahannya dikuasai oleh militer. Setelah memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1948,¹ pemerintahan Burma² berbentuk Republik bernama *Union of Burma* dengan Sao Shwe Thaik sebagai Presiden pertama dan U Nu sebagai Perdana Menteri. Myanmar merupakan negara terbesar kedua di ASEAN setelah Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 60 juta jiwa. Myanmar lebih didominasi etnik Burma yang secara etnis dekat dengan Tibet dan China. Etnik lainnya seperti Kharen, Shan, Rakhine, Mon, Chin, Kachin dan kelompok etnis yang lebih kecil lainnya menjadi ancaman keamanan di dalam negeri dan berkaitan dengan gerakan separatis.³

Pasca kemerdekaan Myanmar, sistem pemerintahan yang demokratis sempat berlangsung beberapa lama, namun terhenti ketika pihak junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win melakukan kudeta di tahun 1958 hingga 1960. Demokrasi sempat bersemi kembali setelah pemilu tahun 1960 yang dimenangkan oleh U Nu dengan partainya *Union Party*. Namun rezim militer

¹ Win Min, "Looking Inside the Burmese Military", *Asean Survey*, Vol. XLVIII No. 6, November/Desember 2008, h.1021.

² Meskipun pada tahun 1990 pemerintah telah merubah nama resmi negara dari Burma ke Myanmar, banyak pembahasan dalam penelitian ini mengacu pada konsep kekinian yaitu yang lebih dikenal sebagai Myanmar. Untuk menghindari kerancuan, dalam penelitian ini saya menggunakan nama Myanmar secara konsisten.

³ Sita Hidriyah, "Proses Demokratisasi Myanmar Menuju Pemilu Presiden Tahun 2012" Vol. III, No. 24/II/P3DI/Desember/2011.

kembali mengambilalih pemerintahan sipil ditahun 1962. Kudeta militer inilah yang menjadi awal dari keruntuhan demokrasi di Myanmar.⁴

Dalam rezimnya, Jenderal Ne Win hanya mengakui satu partai politik yaitu *Burmese Socialist Program Party (BSPP)* atau yang lebih dikenal dengan sebutan Partai Lenzin. Partai tunggal ini dibentuk dengan tujuan untuk mendukung program pemerintahannya yaitu "*Burmese Way to Socialism*".⁵ Kebijakan-kebijakan represif yang dikeluarkan oleh rezim Ne Win menyebabkan munculnya masalah internal yang harus dihadapi oleh rakyat Burma. Oleh karena itu, mulai bermunculan aksi protes besar pada tahun 1988, baik yang dimotori oleh para aktivis mahasiswa maupun tokoh agama seperti biksu. Para demonstran ini mengecam keras dominasi militer di kursi pemerintahan yang mana seharusnya dijalankan oleh sipil. Merasa mendapatkan ancaman, aksi demonstrasi ini ditanggapi secara negatif oleh pemerintah militer dengan tindak kekerasan yang menewaskan 3000 aktivis mahasiswa dan anggota partai oposisi. Tindak kekerasan tersebut memicu aksi demonstrasi terbesar sepanjang sejarah berkuasanya militer di Myanmar yang terjadi pada 8 agustus 1988.⁶ Rakyat menuntut agar dikembalikannya sistem demokrasi multipartai dan digantinya sistem pemerintahan. Aksi ini mengakibatkan Ne Win mundur dari pemerintahan dan digantikan oleh Jenderal Saw Maung pada tanggal 18 September 1988 dan diikuti dengan pembubaran BSPP serta didirikannya SLORC (*State Law and*

⁴ Neil A. Englehart, "Is Regime Change Enough for Burma?, The Problem of State Capacity", *Asian Survey*. Vol. XLV No. 4, July/agustus 2005, hal 623.

⁵ M. Adian Firmas, "*Prospek Demokrasi di Myanmar*", *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol 2 No. 2, 2003, hal 130.

⁶ Myanmar Kenang Demonstrasi 1988. Tersedia dari: <http://lipsus.kompas.com/grammyawards/read/2008/08/08/08513757/Myanmar.Kenang.Demonstrasi.1988>. Diakses pada tanggal 28 september 2015

Order Restoration Council).⁷ Tujuan didirikannya SLORC ini adalah untuk memulihkan keadaan negara dan berkuasa melalui Undang-Undang Darurat (*Martial Law*).

Di bawah kepemimpinan Jenderal Saw Maung, kebijakan yang dihasilkan cenderung membawa perubahan bagi Myanmar. Di mana kebijakan tersebut lebih terbuka dengan negara lain terutama kerjasama dalam bidang ekonomi dan militer. Namun masih terdapat beberapa kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan alasan untuk menciptakan stabilisasi politik, SLORC mengeluarkan rancangan kebijakan hukuman mati bagi setiap demonstran melalui aturan yang disahkan oleh legislatif pada 31 Mei 1989.⁸ Hal ini merupakan bukti bahwasanya demokrasi yang diusung jenderal Saw Maung hanyalah sebuah symbol belaka.

Lebih lanjut, Jenderal Saw Maung merencanakan penyelenggaraan pemilu untuk pemilihan anggota parlemen yang dikenal dengan sebutan *Pyithu Hluttaw* dengan tetap memberlakukan undang-undang darurat dan membekukan konstitusi 1974. Atas persetujuan SLORC, maka diadakan pemilu multipartai yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1990. *National League for Democracy* (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi merupakan partai oposisi yang berhasil memenangkan pemilu tersebut. Keluarnya hasil pemilu yang berada diluar prediksi SLORC menimbulkan keterkejutan bagi junta militer, sehingga SLORC tidak mengakui hasil pemilu tersebut. Bahkan pimpinan partai NLD Aung San

⁷Priyambudi Sulistyanto, “Politik, Reformasi Ekonomi dan Demokrasi; Studi Perbandingan Thailand, Indonesia, dan Burma”, Prisma LP3ES, No. 5 tahun XXVI, Mei-Juni 1997, h 20.

⁸The National Convention in Burma (Myanmar): An Impediment to the Restoration of Democracy. Tersedia dari: <http://www.ibiblio.org/obl/docs/LHR-Diller3.html>. diakses pada tanggal 28 September 2015.

Suu Kyi, ditangkap dan dikenakan hukuman tahanan rumah oleh Pemerintah Myanmar sejak tahun 1992.⁹

Setelah pemilu 1990, Jenderal Saw Maung mengundurkan diri tahun 1993 dan digantikan oleh Jenderal Than Shwe. Setelah kemenangan NLD, SLORC menahan 262 aktivis NLD pada bulan Mei 1996 lalu, karena para aktivis ini mencoba untuk menyelenggarakan kongres NLD yang pertama mereka memenangkan pemilu 1990. Hal ini yang mengakibatkan Myanmar dikategorikan sebagai negara yang paling buruk dalam penegakan demokratisasi di kawasan Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan keterangan tabel berikut ini:

Tabel 1.1 ASEAN Human Rights Scorecard (2003)

	Opposition Parties	Freedom of Media	Freedom of Association	Economic Development	Independence of Judiciary	National Human Rights Commission
Brunei Darussalam	Allowed but no elections	No	No	High	No	Non Existent
Cambodia	Allowed but subjected to harassment	Allowed but subjected to harassment	Allowed within limits	High	No	Non existent
Indonesia	Allowed	Allowed	allowed	Low	No	Yesnt
Laos	Not allowed	Not allowed	Not allowed	Medium	No	Non existent
Malaysia	Allowed within limits	Allowed within limits	Allowed within limits	Medium	No	Yes but not independent
Myanmar	Not Allowed	Allowed	Allowed	Low	No	Not allowed
Philippines	Allowed	Allowed	Allowed	Medium	Yes	Yes
Singapore	Allowed some reserves	Not allowed	Allowed within limits	High	Yes for bussines only	Non existent

⁹ Nurani Chandrawati, "Perluasan ASEM dan Masalah Myanmar : Melanjutkan Strategi Kompromistis atau Membentuk Kriteria Baru", Jurnal Kajian Wilayah Eropa, Vol II No. 3, 2006, h 86.

Thailand	Allowed	Allowed some reserves	allowed	Medium	Yes	Yes
Vietnam	Not allowed	Not allowed	Not allowed	Low	Non existent	Non existent

Sumber : Kek Galabru. *ASEAN Human Rights Scorecard*, dalam Challenges Facing.

Menurut tabel diatas, Myanmar merupakan negara yang tingkat demokrasiya rendah. Hal ini dapat dilihat di negara Myanmar partai oposisi tidak diperbolehkan. Di Myanmar partai yang boleh ada hanya Partai Lenzin yang merupakan kaki tangan militer. Partai NLD (*National League for Democracy*) dibungkam dengan cara menahan pemimpinnya Aung San Suu Kyi. Disamping itu, kebebasan media dan berorganisasi diperbolehkan namun tetap saja penuh keterbatasan. Sehingga dapat dikatakan, bahwa Myanmar merupakan negara yang sangat tertutup, baik dari segi ada tidaknya partai oposisi, kebebasan media, kebebasan berkelompok, tingkat pembangunan ekonomi, peradilan yang bersih, dan hak-hak asasi manusia.

Permasalahan demokrasi dan HAM ini pada akhirnya mengundang perhatian masyarakat internasional. Bahkan berbagai desakan muncul agar Myanmar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negaranya. Desakan dan ancaman internasional atas Myanmar secara tidak langsung membawa dampak buruk bagi situasi dan kondisi domestik Myanmar itu sendiri. Dampak dari sanksi ekonomi negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa selama 20 tahun lebih membuat perekonomian di Myanmar semakin tidak berkembang dan terpuruk.

Desakan yang muncul ternyata tidak hanya berdampak terhadap Myanmar sendiri, namun juga akan berdampak bagi organisasi regional yang menaungi

serta negara-negara yang berada di sekitarnya. Catatan buruk pelaksanaan demokrasi dan pelanggaran HAM di Myanmar menimbulkan stigma negatif terhadap ASEAN. Masyarakat internasional menilai bahwa ASEAN tidak mampu menegakkan HAM dan demokrasi di kawasan Asia Tenggara.¹⁰

Keadaan tersebut juga memicu Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN untuk ikut serta membantu proses demokratisasi di Myanmar. Keseriusan Indonesia dalam ikut serta membantu proses demokratisasi Myanmar juga merupakan permintaan langsung Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sekjen PBB meminta Indonesia beraksi untuk demokrasi di Myanmar. Presiden SBY mengatakan, PBB mengharapkan peran Indonesia untuk memelihara komunikasi dengan pimpinan Myanmar guna menindaklanjuti proses demokratisasi di negara tersebut. Indonesia dengan tegas menyatakan siap berkontribusi apapun bahkan jika diminta menjadi "*monitoring mission*". Desakan agar Indonesia meningkatkan perannya guna menyelesaikan kasus Myanmar tidak hanya muncul dari PBB. *International Crisis Group (ICG)* --organisasi non-pemerintah-- yang berpusat di Brussels juga mendesak Indonesia memimpin penyelenggaraan pertemuan regional tentang krisis politik di Myanmar, seperti peran yang dimainkan dalam mengawali proses perdamaian Kamboja pada 1988. Presiden ICG Gareth Evans menyatakan Indonesia dapat memainkan peran amat penting, mungkin dengan menjadi tuan rumah pertemuan regional sejalan dengan penyelenggaraan *Jakarta*

¹⁰ Dampak Internal dan Eksternal Terhadap Keberhasilan Demokratisasi di Myanmar Tahun 2012. Tersedia di : https://www.academia.edu/4555146/Copy_of_DAMPAK_INTERNAL_DAN_EKSTERNAL_TERHADAP_KEBERHASILAN_DEMOKRATISASI_DI_MYANMAR_TAHUN_2012. Diakses pada tanggal 28 Maret 2016

Informal Meeting (JIM) yang menjadi titik awal proses perdamaian di Kamboja selama 1988-1989.¹¹

Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara mempunyai peran yang penting dalam penegakan demokrasi dan HAM di wilayah ASEAN. Selain karena merupakan salah satu pendiri ASEAN, Indonesia juga merupakan negara yang telah membuktikan diri sebagai negara yang demokratis pasca peristiwa Reformasi pada tahun 1998. Di mana pemilu yang sah diadakan lagi pada tahun 1999 setelah sebelumnya dikuasai oleh partai mayoritas yang dikendalikan oleh presiden Soeharto pada masa pemerintahan Orde Baru. Sebagai elemen penting dari perubahan politik dalam negeri sejak tahun 1998, figur demokrasi tidak dapat diabaikan sebagai elemen utama dari kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam hal ini ada dukungan yang luas dari publik, terutama dari kalangan akademisi, aktivis, LSM dan anggota parlemen, untuk masuknya nilai-nilai demokrasi dan agenda proyeksi demokrasi kedalam kebijakan luar negeri Indonesia. Memasuki awal tahun 2011 Indonesia terpilih menjadi ketua ASEAN 2011 dengan tema komunitas ASEAN ditengah komunitas global bangsa-bangsa. Hal ini menjadi sebuah tantangan besar bagi Indonesia untuk bisa membuat Negara-negara anggota ASEAN lainnya dapat berkontribusi penuh dalam dunia global.

Keberhasilan Indonesia di dalam proses transisi juga diakui oleh dunia internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan kepercayaan negara-negara lain terhadap Indonesia untuk menjadi anggota beberapa organisasi internasional. Salah satunya, Indonesia dipercaya menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan

¹¹ Dunia Minta Indonesia Beraksi Untuk Demokrasi di Myanmar. Tersedia di : <http://www.wartaterkini.com/04/13/41/dunia-minta-indonesia-beraksi-untuk-demokrasi-di-myanmar.html> diakses pada tanggal 25 Mei 2015.

PBB serta berada di dalam badan HAM PBB. Keberhasilan transisi dan posisi strategis Indonesia di dalam badan-badan PBB membuat tekanan terhadap peran Indonesia dalam isu-isu penting juga bertambah. Pada saat yang sama kembali terjadi tragedi dinegara tetangga Indonesia yaitu Myanmar.

Bagi Indonesia isu mengenai Myanmar merupakan hal yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Permasalahan di negara ini telah lama dan berlarut-larut. Konflik yang terjadi di dalam negara Myanmar bukan hanya mengenai ketiadaan demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga merupakan gabungan permasalahan kompleks antara permasalahan sosial dan perpecahan etnis. Dalam hal ini Indonesia mencoba untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemilu dan memperbaiki situasi politik di Myanmar. Selain itu penegakan isu HAM di Myanmar juga menjadi prioritas utama bagi Indonesia mengingat banyaknya terjadi pelanggaran HAM di Negara tersebut.¹²

Sepanjang transisi pemerintahan negara dalam demokratisasi, Indonesia melalui *The Institute for Peace and Democracy* mengambil peran dalam penanaman dan pemahaman nilai-nilai demokrasi bagi Negara Myanmar.

The Insitute Peace and Democracy (IPD) merupakan suatu lembaga yang bersifat independen dan non profit dan merupakan hasil inisiatif pemerintah Indonesia untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan dan mempromosikan demokrasi serta dapat dicermati sebagai bagian dari peran politik luar negeri Indonesia untuk membentuk institusi internasional dan

¹²Jalan Panjang Menuju Demokratisasi di Myanmar. Harian Seputar Indonesia <<http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/89-internasional/7539-jalan-panjang-menujudemokratisasi-di-myanmar.pdf>> Diakses pada 03 Maret 2015.

menyelenggarakan forum dengan mengundang negara – negara sahabat.¹³ Lembaga ini merupakan kerjasama antara Universitas Udayana dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Nasional. Keberadaan IPD di Bali juga bertujuan untuk mendukung terwujudnya program-program dari Bali Democracy Forum (BDF), BDF merupakan prakarsa dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintah RI untuk mengembangkan demokrasi yang dibentuk atas gagasan, ditujukan sebagai wadah komunikasi antar para pemimpin negara se-dunia menyangkut isu-isu perdamaian dan demokrasi.¹⁴

Melalui Bali Democracy Forum (BDF), Indonesia berupaya mendorong demokrasi di kawasan Asia Tenggara dan Asia. Oleh karena itu BDF kemudian didukung dengan pembentukan *Institute for Peace and Democracy* (IPD). Melalui kegiatan BDF dan IPD ini Indonesia sesungguhnya sekaligus juga menebarkan benih-benih demokrasi agar bisa tumbuh subur tidak hanya di Indonesia tetapi juga dikawasan Asia dan bahkan dunia.¹⁵

Peranan Indonesia ini dilakukan pertama kali melalui event *Bali Democracy Forum* (BDF)¹⁶ pada tahun 2008. Melalui event ini, negara Myanmar

¹³ Institute for Peace and Democracy refleksi keajaiban demokrasi Indonesia. Tersedia di: <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/42-januari-2009/232-institute-for-peace-and-democracy-refleksi-keajaiban-demokrasi-indonesia.html>. Diakses pada 29 maret 2016.

¹⁴ Institute for Peace and Democracy Refleksi Keajaiban Demokrasi Indonesia. Terdapat pada : <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/42-januari-2009/232-institute-for-peace-and-democracy-refleksi-keajaiban-demokrasi-indonesia.html> Diakses pada 16 Oktober 2016

¹⁵ Pak Hassan Telah Mengukir Masa Emas Diplomasi Indonesia. Tersedia di: <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/69-november-2009/625-pak-hassan-telah-mengukir-masa-emas-diplomasi-indonesia.html>. Diakses pada 16 Oktober 2016.

¹⁶ Bali Democracy Forum adalah forum kerja sama tahunan negara-negara demokrasi di Asia yang diadakan setiap bulan Desember di Bali, Indonesia. Forum ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas demokrasi dan institusi demokrasi melalui diskusi antar-negara. Terdapat 20 negara yang menjadi peserta dalam forum ini yang mana tiap negara diwakili oleh masing-masing Menteri Luar Negeri.

menyepakati beberapa kesepakatan yang ditetapkan pada beberapa pelaksanaan event tersebut. Seperti pada event *Bali Democracy Forum I* pada tahun 2008, Myanmar mengambil komitmen untuk memperkuat dan mengembangkan proses *electoral*, meningkatkan peranan partai politik, menjunjung tinggi peran hukum dan memperkuat integritas dan kapasitas yudisial, mengembangkan dan memelihara *check and balance* diantara badan penyelenggara pemerintahan, mempromosikan *good governance* (transparansi dan akuntabilitas), mempromosikan demokrasi dan perkembangan social ekonomi, termasuk di dalamnya ketahanan ekonomi nasional dan kawasan, memastikan akses untuk kebutuhan public, menyuburkan peranan wanita dan harmoni, menyuburkan partisipasi kelompok sipil dan pemuda, mempromosikan peranan media massa dalam penggunaan IT untuk mempromosikan komunikasi politik. Dalam BDF III, Myanmar juga sepakat menyatakan bahwa demokrasi dapat bertahan dan berkembang di Negara yang memiliki supremasi hukum, *good governance* dan media massanya menikmati kebebasan dan komunitas sipilnya diperkuat dan memiliki akses terhadap informasi.¹⁷

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah konkrit untuk membantu pemerintah Myanmar melewati permasalahan domestiknya. Upaya tersebut ditempuh dalam berbagai tingkatan: diplomasi bilateral, regional dan multilateral. Di tingkat bilateral, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menempuh jalur diplomasi untuk mendorong rekonsiliasi nasional dan penyelesaian konflik di Myanmar yang melibatkan Etnis rohingya dengan menemui Menteri Luar Negeri Myanmar, Wunna Maung Lwin, pada tanggal 7

¹⁷ Wilson Rojeki Sidauruk. Peran The Institute for Peace and Democracy (IPD) Dalam Demokratisasi di Myanmar. Universitas Riau. 2015.

agustus 2012 di Myanmar. Dalam pertemuan tersebut, marty menganjurkan agar Myanmar membuka dan member akses bagi bantuan kemanusiaan dan OKI untuk meninjau situasi factual pasca konflik di Negara Bagian Rakhine. Anjuran tersebut ditindak lanjuti oleh pemerintah Myanmar dengan membuka tapal batasnya bagi bantuan-bantuan asing dan OKI.¹⁸

Dalam kunjungannya Hassan Wirajuda dan rombongan selaku Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada tanggal 26 agustus-1 september 2012 juga menyampaikan bahwa perubahan yang terjadi di Myanmar cukup signifikan terutama dalam perspektif ekonomi dan sosial budaya. Kota Yangon telah berkembang secara dinamis yang ditandai dengan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur serta roda ekonomi yang bergerak positif. Kegiatan pembangunan infrastruktur juga terlihat di ibukota negara di Nay Pyi Daw, khususnya dalam menyambut penyelenggaraan SEA Games tahun 2013 serta persiapan Myanmar menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2014.¹⁹

Upaya Indonesia dalam memastikan kemajuan proses demokrasi di Myanmar juga mendapatkan apresiasi dari Amerika Serikat yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dalam pertemuan bilateral kedua belah negara di Kementerian Luar Negeri Jakarta.²⁰

¹⁸ Lihat misalnya dalam, “*Myanmar may Allow Rakhine Probe*,” JakartaGlobe, 8 Agustus 2012

¹⁹ Kunjungan Bapak Dr. N. Hassan Wirajuda ke Myanmar. Tersedia di : http://www.kbriyangon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=147:kunjungan-bapak-dr-n-hassan-wirajuda-ke-myanmar&catid=7:news&Itemid=18. Diakses pada tanggal 10 februari 2016

²⁰ 45 Menit, SBY-Hillary Bahas Rohingya Hingga Suriah. Tersedia di : <http://www.beritasatu.com/politik/69743-45-menit-sby-hillary-bahas-rohingya-hingga-suriah.html?.tsrc=emul> diakses pada tanggal 11 Februari 2016

Hal lain terkait Indonesia dan Myanmar, kedua negara berada di dalam kawasan yang sama sehingga tindakan yang dilakukan oleh sebuah negara baik yang dilakukan untuk kepentingan domestik maupun bagi kepentingan internasional, akan berpengaruh pada stabilitas kawasan tempat di mana negara-negara tersebut berada.

Namun tidak mudah bagi Indonesia untuk ikut serta membantu proses demokratisasi yang terjadi di Myanmar, meskipun kedua negara merupakan negara anggota ASEAN akan tetapi sebagai negara yang berdaulat kedua negara harus menghormati prinsip non-intervensi ataupun turut campur atas suatu persoalan yang dialami oleh negara anggota lainnya yang melekat pada setiap tubuh negara anggota ASEAN. Pemerintah Myanmar juga telah mengatakan bahwa dinamika yang terjadi merupakan konflik dalam negeri, yang tidak dapat dicampuri penyelesaiannya oleh negara manapun. Tentu saja ini merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Indonesia harus mampu memberikan pertimbangan yang bisa diterima Myanmar bahwasanya permasalahan demokratisasi dan pelanggaran HAM yang terjadi bukan hanya permasalahan domestik saja, akan tetapi ini juga merupakan permasalahan bagi kawasan ASEAN dan negara anggotanya. Tentunya tetap dengan menghormati kedaulatan dan integritas negara-negara anggota ASEAN

Diharapkan pengalaman Myanmar untuk kembali ke jalan demokrasi, suatu saat mampu menyumbang bagi upaya Indonesia dengan dukungan banyak negara di dunia dalam memperkuat demokrasi di Asia Tenggara dan Asia Pasifik.²¹

²¹ Sita Hidriyah, "PROSES DEMOKRATISASI MYANMAR MENUJU PEMILU PRESIDEN TAHUN 2012" Vol. III, No. 24/II/P3DI/Desember/2011.

I.2 Rumusan Masalah

Sejak dikuasai oleh rezim militer pada tahun 1962 Myanmar mengalami kekacauan domestik. Seluruh nilai-nilai demokrasi diberantas dan digantikan dengan tatanan yang bersifat sentralistik dan otoriter. Namun sistem pemerintahan yang dijalankan tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama masalah perekonomian, konflik etnis dan keterlibatan militer yang terlalu jauh dalam politik Myanmar. Bahkan tak jarang terjadi tindakan represif terhadap rakyat yang mencoba melakukan upaya tersebut.

Sebagai negara yang sukses membuktikan diri melewati masa transisi demokrasi pada tahun 1998, Indonesia mencoba untuk ikut serta membantu proses demokratisasi di Myanmar. Tindakan Indonesia diperkuat dengan adanya permintaan langsung oleh Sekjen PBB Ban Ki Moon terhadap Presiden SBY. Melalui *The Institute for Peace and Democracy*, Indonesia mengambil peran dalam penanaman dan pemahaman nilai-nilai demokrasi bagi negara Myanmar. Hal ini dilakukan pertama kali melalui event *Bali Democracy Forum* pada tahun 2008, di mana Myanmar menyepakati beberapa kesepakatan untuk berkomitmen memperkuat dan mengembangkan proses *electoral*, meningkatkan peranan partai politik, serta penegakan nilai-nilai demokrasi lainnya. Pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dalam membantu proses demokratisasi Myanmar mulai menampakkan hasil yang cukup signifikan.

Dengan adanya tindakan yang diambil oleh Indonesia, dapat dilihat bahwa telah terjadi beberapa perubahan dalam proses demokratisasi Myanmar. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut

peranan yang dilakukan Indonesia dalam Upaya Demokratisasi di Myanmar Pada Masa Pemerintahan Presiden SBY.

I.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah penulis jabarkan diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan, yaitu :

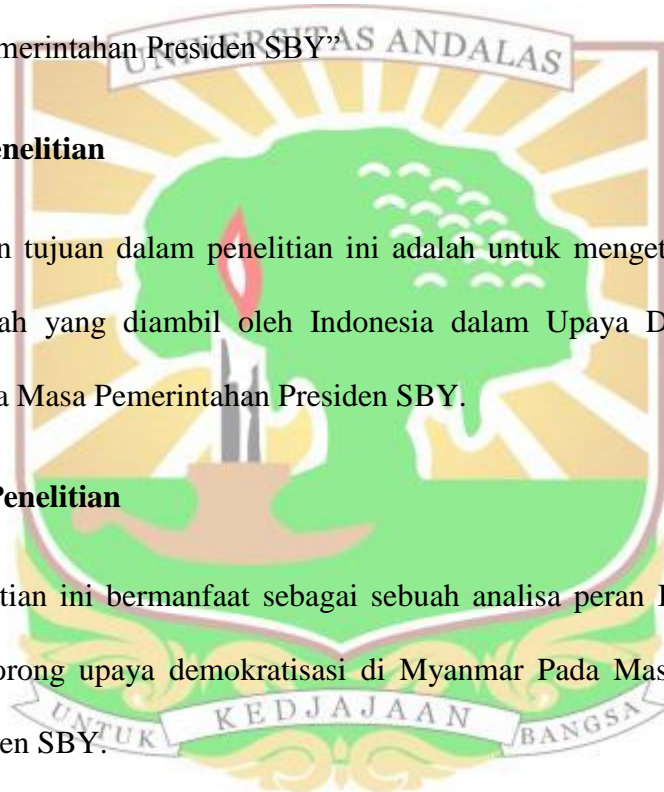
“Bagaimana Peranan Indonesia dalam Upaya Demokratisasi Myanmar Pada Masa Pemerintahan Presiden SBY”

I.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran, dan langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia dalam Upaya Demokratisasi di Myanmar Pada Masa Pemerintahan Presiden SBY.

I.5 Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini bermanfaat sebagai sebuah analisa peran Indonesia dalam mendorong upaya demokratisasi di Myanmar Pada Masa Pemerintahan Presiden SBY.
- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi serta menjadi bahan pertimbangan dan bahan kajian bagi para penstudi Hubungan Internasional dan juga penstudi masalah-masalah internasional.
- c. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak dalam mengambil atau membuat suatu kebijakan.



1.6 Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dan dianggap mampu menunjang penulisan skripsi yang berjudul *“Peranan Indonesia dalam Upaya Demokratisasi di Myanmar Pada Masa Pemerintahan Presiden SBY”*.

“Menjalin Demokrasi Lokal dengan Regional: Membangun Indonesia, Membangun ASEAN (Weaving Democratization on Local Level & Regional Level: Building Indonesia, Building ASEAN)” merupakan paper

yang dipublikasikan oleh CSIS dan ditulis oleh **Christine Susanna Tjhin**, November 2005 dalam *Politics and Social Change Working Paper Series*. Paper ini ditulis sebagai bahan dalam Millenium Seminar, yang dihadiri oleh 60 orang yang merepresentasikan 32 provinsi yang terdapat di Indonesia. Dalam diskusi pada seminar ini dijelaskan bagaimana regionalisme bisa juga membawa dampak positif untuk upaya mendorong proses demokratisasi, terutama jika dikaitkan dengan interaksi masyarakat sipil yang melintasi batas negara.

Yang menjadi fokus dalam paper yang ditulis oleh Tjhin lebih mengkonsentrasikan pada institusionalisasi dinamika masyarakat ASEAN. Ini merupakan salah satu inisiatif masyarakat sipil yang ditawarkan melalui sebuah forum masyarakat sipil regional yang dalam hal ini dimanifestasikan ke dalam bentuk forum yang dinamakan Majelis Rakyat ASEAN (*ASEAN People's Assembly* atau APA). Christine memberikan gambaran perkembangan terakhir dalam ASEAN, sehubungan dengan elemen masyarakat sipil Asia Tenggara yang tujuan utamanya adalah mendorong pelebaran dan pendalaman proses

demokratisasi. Pelebaran dalam arti melibatkan negara-negara di kawasan regional sedangkan pendalaman dalam arti melibatkan elemen-elemen daerah di negara yang bersangkutan. APA dalam pertemuan kedua di Sanur Bali merencanakan sebuah aksi yang dinamakan Penilaian Demokratisasi di Asia Tenggara demi mendorong proses demokratisasi di kawasan tersebut. Yang menjadi tujuan umum dari program ini adalah untuk menjadi katalis dari inisiatif pemberdayaan regional yang comprehensive yang sifatnya berkesinambungan.

Dalam hal ini penulis melihat kesamaan tujuan antara APA dengan *Bali Democracy Forum* yang merupakan sebuah forum yang diprakarsai oleh negara Indonesia dan bertujuan sebagai wadah untuk saling bertukar informasi mengenai isu demokrasi, di mana APA juga menjadi salah satu forum untuk mengekspresikan aspirasi masyarakat Asia Tenggara sambil menciptakan tekanan kepada pemerintah Negara ASEAN terutama dalam aspek demokrasi. Dan juga disaat yang bersamaan, terdapat aspek pemberdayaan masyarakat sipil serta pertukaran pengalaman dan strategi antar sesama anggota.

Yang menjadi literatur berikutnya merupakan Thesis dari **Taufan Dwi Putra**, Universitas Indonesia yang berjudul **"Kebijakan luar negeri Republik Indonesia Terhadap Myanmar: studi kasus isu demokrasi di Myanmar"**.²²

Dalam thesis ini, Taufan Dwi Putra memaparkan bagaimana dinamika yang terjadi dalam tatanan dunia internasional terutama dalam hal demokrasi dan Hak Asasi Manusia sangat mempengaruhi kebijakan yang diterapkan oleh suatu Negara baik secara internal maupun eksternal. Sebagaimana kebijakan luar negeri

²²Dwi Putra, Taufan. *Kebijakan luar negeri Republik Indonesia terhadap Myanmar: studi kasus isu demokrasi di Myanmar*. Universitas Indonesia

yang dikeluarkan oleh Indonesia terhadap permasalahan demokrasi yang saat ini tengah berkejolak di Negara Myanmar. Kebijakan ini sejalan dengan pembentukan komisi bersama antara kedua Negara dan merupakan bukti konkrit akan adanya dukungan Indonesia terutama dalam membimbing Myanmar menjalani tahapan transisi dan perwujudan dari politik Indonesia yang bebas dan aktif serta sesuai dengan arah kebijakan Luar Negeri Indonesia yaitu dengan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional.

Taufan Dwi Putra dalam tulisannya mencoba menggunakan *Foreign Policy Analysis Theory* yang dikemukakan oleh K.J. Holsti sebagai pisau analisis dalam menjelaskan *policy making process* yang terjadi di Indonesia serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Yang menjadi acuan penulis berikutnya merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Aghisna Kumala Tunjung Sari, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya yang berjudul **“Pengaruh Kebijakan Constructive Engagement ASEAN terhadap Demokratisasi di Myanmar”**. Pada jurnal ini dijelaskan bagaimana Negara Myanmar yang awalnya kuasai oleh junta militer menutup negaranya terhadap perkembangan dunia luar, sehingga terjadinya krisis ekonomi yang menuai protes besar-besaran oleh masyarakat Myanmar. Tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar menyebabkan munculnya isu-isu pelanggaran HAM dan demokrasi di Myanmar. Lebih dari itu tindakan kekerasan juga dilakukan oleh pemerintah Myanmar hingga saat ini. Hal inilah yang menjadi penyebab munculnya masalah-masalah lain sehingga memicu adanya campur tangan dari luar terhadap isu tersebut.

ASEAN yang merupakan organisasi regional di mana Myanmar tergabung di dalamnya mencoba untuk menengahi permasalahan tersebut. Melalui prinsip non-interference ASEAN mencoba menangani kasus tersebut dengan menerapkan sebuah kebijakan untuk mendorong adanya demokrasi yang diharapkan sekaligus dapat mengakhiri pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang kerap dilakukan junta militer, kebijakan tersebut adalah *constructive engagement*.²³

Acuan penulis berikutnya merupakan *fact sheet* yang dikeluarkan oleh USAID pada tahun 2012 yang berjudul "*United States-Burma Partnership for Democracy, Peace, and Prosperity*"²⁴. Pada *fact sheet* ini dijelaskan bagaimana peranan Negara Amerika Serikat dalam proses demokratisasi yang terjadi di Myanmar. Dalam hal ini Amerika Serikat membangun sebuah kemitraan bersama dengan pemerintah Myanmar untuk memajukan reformasi demokrasi. Dalam memajukan pembangunan dan proses reformasi demokrasi di Myanmar, kedua Negara menegaskan beberapa prinsip bersama yang mencakup inklusivitas, transparansi, akuntabilitas dan pemberdayaan lokal. Untuk mendukung proses transisi tersebut AS juga memberikan bantuan dan kerjasama dalam beberapa bidang seperti pada bidang demokrasi, HAM dan hukum; tata transparansi pemerintahan; dukungan terhadap penciptaan perdamaian domestic dan kesejahteraan di Myanmar.

Terkait dengan penelitian yang tengah penulis lakukan, penulis melihat adanya kemiripan tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan

²³ Kumala T. S. Aghisna. *Pengaruh Kebijakan Constructive Engagement ASEAN terhadap Demokratisasi di Myanmar*. Universitas Brawijaya. 2014.

²⁴http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/USAID_Burma_framework_fact_sheet.pdf (diakses pada 6 Mei 2015 pukul 00.46)

Indonesia di mana kedua Negara ini turut memberikan kontribusi agar terwujudnya sistem demokrasi di Myanmar.

Literatur terakhir merupakan jurnal yang ditulis oleh **Brian Vogt**, ia merupakan pakar demokrasi dan penasihat pemerintah Afghanistan dan Pakistan dalam bidang USAID. Jurnal yang berjudul *“The path to Civilian Rule in Burma Goes through Indonesia”* dikeluarkan pada bulan februari 2014.

Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai kebebasan dan kemenangan Aung San Suu Kyi di kursi parlemen pada tahun 2012 melalui pemilu. Serta banyak dari tahanan politik lainnya yang juga dibebaskan dan dihapuskannya sensor terhadap media. Bahkan U.S dan Negara barat lainnya tengah memulai proses pengurangan dan penghapusan sanksi yang selama ini menjadikan Burma terisolasi dari komunitas internasional. Selain itu pada jurnal ini juga dijelaskan mengenai fase awal untuk memulai menyelusuri cara yang tepat untuk memperkuat struktur yang mendasari sehingga mampu menahan perubahan dalam kepemimpinan dan memungkinkan untuk terjadinya kemajuan di bidang demokrasi yang berkelanjutan di Burma.

Namun dibalik semua itu, tanpa adanya persetujuan dari pihak militer, bagaimanapun juga, reformasi konstitusi untuk mengurangi peran militer dalam pemerintahan secara praktek mustahil dilakukan dalam jangka waktu yang singkat. Oleh karena itu sangat tepat untuk menentukan terlebih dahulu jika terdapat model yang tepat yang merepresentasikan militer Burma secara sukarela dan bertahap melakukan transisi dari pemerintahan militer ke pemerintahan sipil. Indonesia sebagai Negara penganut demokrasi terbesar di ASEAN menghadirkan

sebuah model transisi dengan cara yang mampu mempertahankan integritas structural Negara dan figur militer.

Jurnal ini juga menunjukkan kesejajaran yang erat antara pemerintah Burma saat ini dengan pemerintahan Orde Baru Indonesia. Selain itu juga dipaparkan mengenai kemitraan trilateral yang dipimpin oleh Amerika Serikat dapat meletakkan dasar bagi reformasi hubungan sipil-militer.

Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah:

- a. Penelitian ini menekankan pada peranan Indonesia yang mencoba membantu proses demokratisasi di negara Myanmar.
- b. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2012 sampai pada tahun 2014 karena pada tahun tersebut Indonesia yang berada di bawah pemerintahan presiden SBY melalui event *Bali Democracy Forum* dan *The Institute for Peace and Democracy* fokus untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi di Myanmar.

I.7 Kerangka Konseptual

Dalam upaya menjawab rumusan masalah penulis menggunakan beberapa teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Menurut Masri Singarimbun, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proporsi yang menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep. Sedangkan menurut Mochtar Mas'ood suatu konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek atau fenomena tertentu.

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep peranan nasional sebagaimana yang dijelaskan oleh para pentiori di bawah ini. Adapun tujuan dari penggunaan teori ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Indonesia mencoba memainkan peranannya untuk ikut serta membantu proses demokratisasi di Myanmar dan nilai-nilai serta aspek yang harus dimiliki oleh sebuah Negara untuk mewujudkan sebuah Negara yang demokrasi.

1.7.1 Konsep Peranan Nasional

Konsep peranan nasional dapat membantu menggambarkan tugas suatu negara dan memberikan pedoman dalam bertindak ketika negara tersebut telah mengidentifikasi peranan nasionalnya. Dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Wawan Juanda, Holsti menyatakan bahwa :²⁵

“...peranan nasional menggambarkan fungsi dan tugas suatu negara dalam berbagai konteks internasional yang berbeda. Dengan demikian peranan nasional memberikan pedoman untuk bertindak ketika situasi tertentu muncul pada lingkungan internasional.”

K.J Holsti dalam bukunya “*National Role Conception in the study of Foreign Policy*” memperlihatkan bahwa ada paling sedikit 16 tipe peranan nasional yang merupakan komponen kebijakan luar negeri Negara, yaitu :

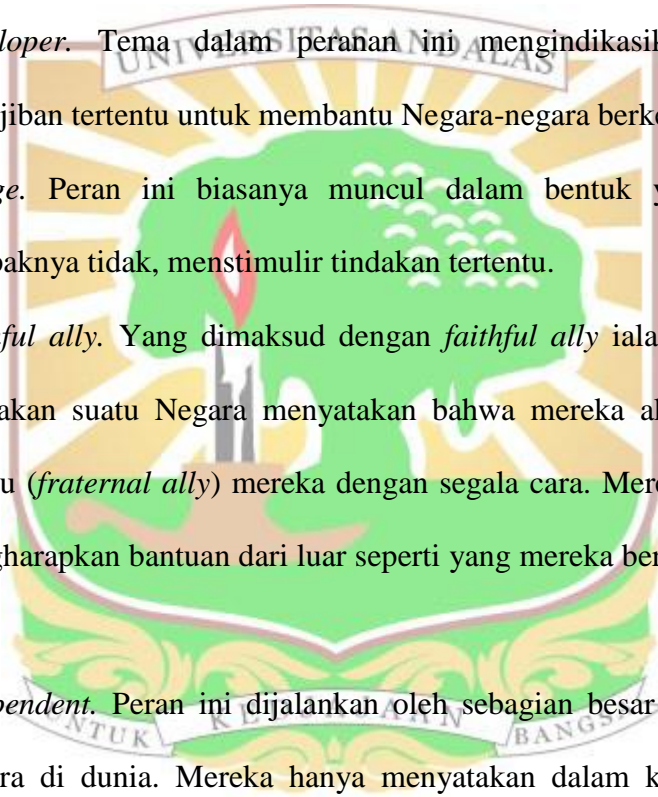
1. *Bastion of the Revolution, liberator.* Beberapa pemerintah merasa mempunyai tugas untuk mengorganisasikan atau memimpin berbagai gerakan revolusi di luar negeri.

²⁵ K.J Holsti (terj). 1987. Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis. Bandung. Binacipta. Hal 166.

2. *Regional leader*. Tema dalam peranan ini merujuk pada tugas atau tanggung jawab khusus yang didasari oleh sebuah negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain di kawasan yang sama.
3. *Regional Protector*. Walaupun nampaknya peran ini mengimplikasikan tanggung jawab kepemimpinan tertentu dalam sebuah kawasan atau *issuearea*, peranan ini menekankan pentingnya pemberian perlindungan bagi kawasan sekitarnya.
4. *Active Independent*. Tema dalam peran ini menekankan pentingnya peningkatan keterlibatan mengenai hubungan diplomatic dengan Negara-negara lain sebanyak mungkin dan biasanya bertindak sebagai penengah dalam konflik antar blok.
5. *Liberation Supporter*. Tidak seperti peran *Bastion of the Revolution*, peran ini tidak mengindikasikan tanggung jawab formal untuk mengorganisasi, memimpin atau mendukung secara fisik gerakan kemerdekaan di luar negeri.
6. *Anti-imperialist Agent*. Di mana imperialisme dilihat sebagai ancaman serius, banyak Negara memandang dirinya sebagai 'agen' dalam perjuangan melawan imperialisme.
7. *Defender of the Faith*. Beberapa pemerintah memandang kebijakan luar negerinya dalam term nilai-nilai pelindung (tapi tidak dalam batas wilayah tertentu) dari serangan.
8. *Mediator-integrator*. Beberapa pemerintahan kontemporer memandang dirinya mampu atau bertanggungjawab untuk memenuhi atau menjalankan tugas sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah di

negara lain. Mereka menganggap dirinya sebagai penyelesai masalah di kawasan regional maupun global.

9. *Regional-subsystem collaboration*. Tema peranan ini berbeda dari peran *Mediator-integrator* karena peran ini tidak menghadapi konflik yang sama. Peran ini mengindikasikan komitmen yang lebih jauh terhadap kerjasama dengan Negara lain untuk membangun masyarakat luas yang bersatu, bekerjasama, dan berintegrasi dengan unit politik lainnya.
10. *Developer*. Tema dalam peranan ini mengindikasikan tugas atau kewajiban tertentu untuk membantu Negara-negara berkembang.
11. *Bridge*. Peran ini biasanya muncul dalam bentuk yang unik, dan nampaknya tidak, menstimulir tindakan tertentu.
12. *Faithful ally*. Yang dimaksud dengan *faithful ally* ialah, bila pembuat kebijakan suatu Negara menyatakan bahwa mereka akan mendukung sekutu (*fraternal ally*) mereka dengan segala cara. Mereka tidak terlalu mengharapkan bantuan dari luar seperti yang mereka berikan pada pihak lain.
13. *Independent*. Peran ini dijalankan oleh sebagian besar para pemimpin Negara di dunia. Mereka hanya menyatakan dalam keadaan apapun, pemerintah mereka akan mengejar kepentingan mereka, jika tidak mereka tidak akan bertindak atau menjalankan fungsi apapun dalam sistem internasional.
14. *Example* (keteladanan). Peran ini menekankan pentingnya mempromosikan prestise dan mempunyai pengaruh dalam sistem



internasional dengan cara menjalankan kebijakan dalam negeri tertentu. Ia menjadi contoh (teladan) bagi Negara-negara lain.

15. *Internal development*. Konsep peranan ini tidak merujuk pada tugas atau fungsi tertentu dalam sistem internasional tetapi pada kesadaran bahwa kepentingan Negara adalah membangun negaranya sendiri. Peran ini juga menyiratkan rendahnya partisipasi dalam politik internasional.

16. *Other role*. Peranan ini mengimplikasikan adanya sumber-sumber lain yang melatarbelakangi tindakan suatu Negara dalam politik luar negerinya selain yang telah disebutkan diatas.²⁶

Peranan nasional bertindak sebagai kebijakan luar negeri suatu negara pada saat ia terlibat dalam suatu masalah regional maupun internasional. Peranan nasional juga memiliki ciri-ciri yang mengarah pada tindakan yang lebih konkret. Misalnya, ketika suatu negara berperan sebagai *mediator-integrator*, bisa diramalkan bahwa negara tersebut bersedia menawarkan penyelesaian masalah dan melakukan beberapa usaha diplomatik jika suatu konflik terjadi.²⁷

Peranan nasional sendiri sangat berkaitan erat dengan kebutuhan domestik, sikap masyarakat serta kondisi eksternal negaranya. Peranan nasional suatu negara juga dapat diidentifikasi dari tujuan negara tersebut dimana dalam membantu demokratisasi di Myanmar, Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan prestisnya sebagai negara yang mampu menyelesaikan, mendamaikan dan melakukan mediasi dalam konflik negara lain.²⁸

²⁶ K.J Holsti, "National Role Conception in the study of Foreign Policy," *International Studies Quarterly*, 14 (1970), 233-309

²⁷ K.J Holsti, Hal 159.

²⁸ K.J Holsti, Hal 165.

Untuk itulah, penulis menggunakan salah satu dari 16 jenis konsepsi peranan nasional yang dikemukakan Holsti yang dapat menggambarkan peranan Indonesia dalam membantu demokratisasi Myanmar tergolong sebagai *mediator-integrator* dengan pengertian sebagai berikut:²⁹

“Beberapa pemerintahan kontemporer memandang dirinya mampu atau bertanggungjawab untuk memenuhi atau menjalankan tugas sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah di negara lain. Mereka menganggap dirinya sebagai penyelesai masalah di kawasan regional maupun global.”

Holsti juga menyampaikan bahwa terdapat sumber-sumber yang dapat dijadikan pertimbangan mengapa negara tersebut menjalankan sebuah konsepsi peranan nasional sebagai *mediator-integrator*:

1. Lokasi Geografis

Geografis dan topografi merupakan faktor paling penting karena sifatnya yang permanen. Sehingga dapat memberikan peluang dan batasan program kebijaksanaan luar negeri suatu negara. Dalam hal ini, Indonesia dan Myanmar memiliki kedekatan geografi di wilayah Asia Tenggara.³⁰

2. Peranan Tradisional

Hal ini dapat dijelaskan dengan sikap Indonesia yang menjunjung tinggi HAM dan keinginan untuk menghapuskan penjajahan diatas dunia seperti yang tertuang dalam UUD dan arah politik luar negeri Indonesia.³¹

²⁹ K.J Holsti, “National Role Conception in the study of Foreign Policy,” *International Studies Quarterly*, 14 (1970), 233-309

³⁰ K.J Holsti, hal 493.

³¹ Citra Media Wacana. 2008. “UUD 1945 dan GBHN.” Hal 1 dan 116.

3. Komposisi Etnis-Budaya Nasional

Berkaitan erat dengan kondisi Indonesia dan Myanmar yang merupakan negara multietnis. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa Indonesia harus ikut serta membantu proses demokratisasi yang terjadi di Myanmar.

Sebuah konsepsi peranan juga dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa variabel kondisi tertentu seperti sikap dan pendapat masyarakat, kebutuhan ekonomi, identifikasi diri terhadap kawasan, komposisi etnis dan lain sebagainya.³² Dalam menjelaskan peranan Indonesia dalam membantu demokratisasi Myanmar, selain melihat dari peranannya sebagai *mediator-integrator*, penulis juga melihat dari berbagai sumber yang dicantumkan oleh Holsti yang akan dibagi menjadi aspek internal (mencakup kebutuhan domestik, sikap masyarakat dan identifikasi diri terhadap kawasan) serta aspek eksternal yang dapat digambarkan sebagai respon atas apa yang terjadi di lingkungan eksternal Indonesia.³³

Arthur A. Goldsmith dalam jurnalnya "*Democratization in the 21st Century: What Can The United States Do*" menjelaskan bagaimana perkembangan penyebaran isu demokratisasi serta bagaimana peranan aktor eksternal dalam mempengaruhi demokratisasi di suatu negara. Goldsmith memaparkan terdapat 4 pendekatan yang lazim digunakan sebuah negara dalam menyebarkan nilai-nilai demokrasi³⁴ :

³² K.J Holsti (terj). 1987. Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis. Bandung. Binacipta. Hal 463 dan 465.

³³ K.J Holsti, Hal 489.

³⁴ Arthur A. Goldsmith, "Democratization in the 21st Century: What Can The United States Do", The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, Summer/Fall 2007, hlm. 2.

1. Intervensi Militer (*Military Interventions*)

Dalam prakteknya negara-negara maju sering melakukan intervensi militer dengan atau tanpa restu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Goldsmith menyatakan bahwa intervensi militer tidak selalu diniatkan untuk menyebarkan demokrasi. Tetapi seringkali atas nama demokrasi, negara maju melakukan intervensi militer terhadap negara yang dianggap otoriter.

2. Sanksi Ekonomi (*Economic Sanctions*)

Kebijakan seperti ini mempunyai kelebihan dibanding intervensi militer. Embargo ekonomi juga membuat rezim domestik yang otoriter tersebut semakin tidak populer di mata rakyat, karena dianggap tidak bisa memakmurkan rakyat. Dari beberapa tipe embargo seperti embargo unilateral, multilateral, hanya beberapa negara saja yang berhasil berubah menjadi demokratis ketika diberi sanksi ekonomi.

3. Bantuan Luar Negeri (*Foreign Aid*)

Bantuan luar negeri (*foreign aids*). Kelebihan kebijakan ini dibanding dua kebijakan sebelumnya adalah tidak bersifat bermusuhan, tetapi lebih bersifat kooperatif. Menurut Goldsmith bantuan militer seperti pertukaran dan latihan bersama pasukan bisa menjadi kesempatan untuk menanamkan pengetahuan tentang demokrasi dan HAM bagi pasukan yang menjalani pertukaran tersebut.

4. Pendampingan Secara Teknis (*Technical Assistance*)

Pendampingan secara teknis merupakan jalan terakhir dalam usaha pencapaian demokrasi. Pendampingan ini meliputi pendampingan dalam proses pemilihan umum, pembuatan aturan hukum, dan aktifitas lainnya

yang berkaitan dengan proses menuju demokrasi. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia melalui *The Institute for Peace and Democracy* untuk mendorong pemerintahan Myanmar pada event *Bali Democracy Forum I* menyepakati beberapa kesepakatan untuk mengambil komitmen memperkuat dan mengembangkan proses electoral, meningkatkan peranan partai politik, menjunjung tinggi peranan hukum dan memperkuat integritas dan kapasitas yudisial, mengembangkan dan memelihara check and balance diantara badan penyelenggara pemerintahan, mempromosikan good governance, mempromosikan demokrasi dan perkembangan sosial ekonomi, termasuk di dalamnya ketahanan ekonomi nasional dan kawasan, memastikan akses untuk kebutuhan publik, menyuburkan peranan wanita dan harmoni, menyuburkan partisipasi kelompok sipil dan pemuda, serta mempromosikan peranan media massa dalam penggunaan IT untuk mempromosikan komunikasi politik.

Para teroris pendukung demokrasi menyebut demokrasi adalah agen perdamaian. Dengan menerapkan demokrasi, sebuah negara lebih condong pada perdamaian daripada perang. Mereka berpendapat bahwa negara yang menganut paham demokrasi tidak berperang satu sama lain karena demokrasi berbagi kesamaan norma untuk hidup bersama, dan memiliki institusi domestik yang dapat menahan negara untuk berperang. Pada praktiknya, teori perdamaian demokratik menyediakan justifikasi intelektual untuk keyakinan yang

menyimpulkan bahwa penyebaran demokrasi ke negara lain akan membawa kebaikan pada keamanan nasional dan mendukung perdamaian dunia.³⁵

Teori Perdamaian Demokratik adalah suatu teori atau pemahaman bahwa jika dibangunnya sistem demokrasi dalam suatu negara maka negara tersebut akan cenderung untuk menghindari perang terkecuali untuk melakukan pertahanan diri. Pemahaman ini dicetuskan oleh Immanuel Kant seorang filsuf Jerman pada sekitar tahun 1795.³⁶ Inilah kenapa Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kebijakan luar negerinya fokus terhadap penyebaran nilai-nilai demokrasi ke negara lain.

I.8 Metodologi

1.8.1. Tipe Penelitian

Demi mencapai tujuan dari penelitian ini, penulis mencoba untuk menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang lebih bergantung pada data-data linguistik dibanding data-data numerik, dan menggunakan basis *meaning* dalam analisis data.³⁷ Disamping itu pendekatan yang peneliti pilih adalah pendekatan kualitatif deskriptif analisis, di mana tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang komprehensif mengenai kejadian spesifik yang dialami oleh individu maupun suatu kelompok.³⁸

³⁵ Apakah Demokrasi Membawa Kedamaian. Tersedia di: <http://www.paramadinapusat.or.id/publikasi/laporan-kegiatan/apakah-demokrasi-membawa-perdamaian.html> Diakses pada 29 maret 2016

³⁶ Mtholyoke, "Immanuel Kant Perpetual Peace: A Philosophical Sketch". Tersedia di: <http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kant/kant1.html>. diakses pada 29 maret 2016

³⁷ Robert Elliot and Ladislav Timulak, *Descriptive and Interpretive approaches to Qualitative Research*, 147.

³⁸ Vickie A. Lambert and Clinton E. Lambert, *Qualitative Descriptive Research : An Acceptable Design*, 2.

1.8.2 Batasan Penelitian

Guna mengidentifikasi dan memberikan analisa yang lebih mendalam, penelitian ini akan dibatasi pada peranan Indonesia terhadap negara yang tengah mengalami proses transisi demokratisasi seperti yang tengah terjadi di Myanmar selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2012 hingga 2014. Hal ini didasarkan pada pemerintahan Presiden SBY yang sangat gencar menyebarkan nilai-nilai demokrasi terhadap Negara-negara yang tengah mengalami proses transisi baik secara regional maupun global melalui lembaga *The Institute for Peace and Democracy* yang dibentuk oleh Indonesia sebagai wadah untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi di Asia Pasifik.

1.8.3 Unit Analisa dan Tingkat Analisa

Yang menjadi unit analisa pada penelitian ini adalah Negara Indonesia yang merupakan aktor tertinggi dalam pembuatan kebijakan. Sedangkan yang menjadi tingkat analisa merupakan Negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data-data sekunder, yakni data-data dan informasi yang secara keseluruhan diambil dari temuan-temuan yang dihasilkan pihak lain, dan data yang digunakan dapat berupa data-data kuantitatif maupun kualitatif. Beberapa sumber tertulis yang digunakan seperti jurnal ilmiah dan laporan penelitian untuk mengumpulkan fakta-fakta sebagai alat bukti. Selain itu juga digunakan data yang diperoleh melalui situs berita internasional dan surat kabar nasional.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Pada tahap analisis data ini akan dimulai dengan mengumpulkan data-data mengenai dinamika demokratisasi di Myanmar. Kemudian mengumpulkan data-data yang berisi fakta bahwa dinamika yang terjadi di Myanmar menarik perhatian dunia internasional yang dalam hal ini Negara Indonesia untuk ikut serta membantu jalannya demokratisasi di Myanmar.

Menurut Holsti terdapat 16 tipe peranan nasional yang merupakan komponen kebijakan luar negeri suatu negara. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan salah satu dari enam belas tipe peranan nasional tersebut yaitu *mediator-integrator*, dikarenakan poin tersebut mampu menjelaskan peranan yang diambil oleh Indonesia dalam membantu proses demokratisasi di Myanmar.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I

Di dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah dan alasan ketertarikan penulis terhadap isu yang akan diteliti, perumusan masalah serta tujuan dari penelitian itu sendiri. Selain itu juga terdapat teori-teori serta konsep yang peneliti gunakan dalam menganalisis isu tersebut. Metode serta sistematika penulisan juga dijelaskan pada bagian ini.

BAB II

Bab ini memaparkan sistem politik dan pemerintahan dinamika proses demokratisasi yang terjadi di Myanmar. Di sini juga dijelaskan mengenai sistem

pemerintahan dan bentuk perlawanan dan perjuangan masyarakat Myanmar dalam menuju Negara demokrasi.

BAB III

Bab ini menyuguhkan pengetahuan mengenai negara Indonesia yang merupakan salah satu negara di ASEAN dan juga merupakan negara terbesar ke-3 yang menganut paham demokrasi. Serta yang melatarbelakangi Indonesia di bawah pemerintahan SBY untuk ikut serta membantu Negara-negara yang tengah berada pada masa transisi dari sistem otoriter ke sistem demokrasi, seperti yang tengah terjadi di Negara Myanmar.

BAB IV

Bagian ini fokus kepada isu dan permasalahan yang diangkat serta menganalisis peranan Indonesia dalam membantu proses demokratisasi yang tengah terjadi di Myanmar dengan menggunakan teori peran.

BAB V

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

Daftar Pustaka

Bab ini berisikan sumber-sumber yang penulis gunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini.

